

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN KEILMUAN LANJUT**

Judul Penelitian : Analisis Pemaknaan Budaya Terhadap Program Paket C
Kode>Nama Rumpun Ilmi : 601/Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Peneliti
Nama : Dra. Yulia Budiwati
NIDN : 0016076301
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program studi : Sosiologi
Nomor HP : 08129591993
Alamat Surel (e-mail) : yulia@ut.ac.id
Perguruan Tinggi : Universitas Terbuka
Lama penelitian : 1 (satu) tahun
Biaya Penelitian : Rp. 30.000.000

Tangerang Selatan, 1 Desember 2014

Menyetujui
Dekan FISIP-UT

Peneliti

Daryono, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19640722 198903 1 019

Dra. Yulia Budiwati, M.Si
NIP. 19630716 199103 2 002

Menyetujui
Ketua lembaga Penelitian

Ir. Kristanti Ambar Puspitasari, M.Ed., Ph.D.
NIP. 19610212 198603 2 001

Penelitian: Keilmuan Lanjut

**Analisis Pemaknaan Budaya Terhadap
Program Paket C**

oleh
Yulia Budiwati (yulia@ut.ac.id)

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Terbuka
2014**

Bab I Pendahuluan

I. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk program pembelajaran yang termuat dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang merupakan bagian dari Pendidikan Nonformal. Salah satu program pendidikan PLS adalah pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C). Sebagai pendidikan kesetaraan, Program Paket, khususnya Paket C, dari sisi ketermanfaatannya menuai pro dan kontra (Piliang, 2006). Bagi mereka yang setuju dengan program ini menganggap bahwa program ini merupakan pemecahan bagi masalah tingginya angka ketidakhadiran pendidikan menengah strata SLTA. Namun kelompok lain tidak sepenuhnya setuju dengan alasan jurusan dan jenis sekolah yang ditawarkan berbeda dengan pendidikan SLTA. Dari kalangan siswa sendiri juga terjadi pro dan kontra dimana sebagian siswa menganggap Program Paket C merupakan jalan keluar bagi yang tidak lulus SLTA namun tetap ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Sebagian siswa yang lain, yang kontra dengan program ini, karena menganggap pendidikan ini merupakan pendidikan “kelas bawah” yang dianggap jauh dari setara dengan sekolah mereka sebelumnya.

Formatted: Not Highlight

Keberadaan Program Paket A, B, dan C, beserta pro dan kontranya, menjadi menarik untuk dikaji dan ditelaah. Cukup banyak penelitian yang menyoroti permasalahan seputar program ini. Moedjiarto (ejournal.unesa.ac.id/article/7348/74/article.pdf) melakukan penelitian dengan cara membandingkan pelaksanaan Program Paket B di Desa Mlinjon dan Desa Ngares, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa karakteristik peserta Program Paket B dari kedua desa tersebut berbeda yang menyebabkan perbedaan pada tingkat partisipasi peserta. Namun permasalahan yang dihadapi Program Paket B di kedua desa tersebut sama, yaitu tingkat partisipasi peserta pada musim hujan dan musim panen, kecilnya honor tutor yang berdampak pada kinerja tutor, dan kecilnya dana penyelenggaraan yang berasal dari pemerintah daerah.

Formatted: Not Highlight

Arisna Puspitasari (<http://lib.unnes.ac.id/14160/>) juga mengkaji kendala yang dihadapi Program Paket C yang diselenggarakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Demak. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa jauhnya jarak lokasi pemukiman peserta program dengan tempat SKB menyebabkan partisipasi peserta rendah. Sama halnya dengan kasus yang ditemukan Moedjiarto, Arisna Puspitasari juga menemukan fakta bahwa

Formatted: Not Highlight

pada musim tanam dan panen maka partisipasi peserta turun drastis, di mana penurunan ini lebih dikarenakan orientasi kerja mereka lebih tinggi daripada orientasi untuk sekolah. Permasalahan lainnya juga masih sama dengan hasil temuan Moedjiarto yaitu menyangkut rendahnya kinerja tutor. Prasarana dan sarana SKB yang jauh dari berkualitas juga menjadi masalah utama Program Paket C di SKB Kabupaten Demak ini.

Hendrowanto Nibel (2007) juga melakukan penelitian tentang keikutsertaan warga belajar pada Program Paket C di PKBM Kejar Mendawai dan Tilung Raya di Kota Palangkaraya. Dalam penelitiannya, yang membandingkan kedua PKBM tersebut, Hendrowanto Nibel menemukan bahwa penyelenggaraan PKBM di Kejar Mendawai jauh lebih bagus daripada di Tilung Raya. Aspek yang diperbandingkan antara lain meliputi partisipasi peserta, pengelolaan, kualifikasi dan kinerja tutor, tertib administrasi, proses pembelajaran dan pencapaian akademik peserta program.

Dari data-data penelitian yang diperoleh nampak bahwa semua penelitian cenderung menyoroti masalah penyelenggaraan Program Paket Kesetaraan dengan mengetengahkan hambatan yang dihadapi program tersebut. Sementara itu, aspek yang lebih mendasar, yaitu pemaknaan terhadap Program Paket Kesetaraan dari pihak-pihak yang terlibat dalam program tersebut belum sepenuhnya diungkapkan, padahal aspek pemaknaan ini dapat memberikan penjelasan yang sangat signifikan terkait dengan hasil dari penyelenggaraan Program Paket Kesetaraan termasuk di dalamnya hambatan yang dihadapi. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian yang dapat menggambarkan signifikansi Program Paket Kesetaraan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam program tersebut. Dalam paradigma antropologi, penggambaran signifikansi dilakukan melalui pengungkapan makna budaya. Dengan demikian, fokus dari penelitian ini adalah analisis pemaknaan budaya terhadap Program Paket Kesetaraan, khususnya Paket C.

II. Permasalahan Penelitian

Berangkat dari latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka permasalahan penelitian yang dapat dirumuskan adalah bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam Program Paket C memberikan pemaknaan terhadap Program Paket C. Terkait dengan permasalahan penelitian ini maka pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan adalah:

1. Pemaknaan apa saja yang dimunculkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam Program Paket C terhadap Program Paket C?
2. Bagaimana signifikansi logis dari pemaknaan tersebut?

Formatted: Not Highlight

Oleh karena hasil dari pemaknaan budaya ini dapat direfleksikan pada tataran kebijakan, yaitu tujuan filosofi dari Program Kejar Paket C, maka pertanyaan lanjutan yang dapat dirumuskan adalah:

3. Apakah tujuan filosofi Program Paket C sebagaimana yang telah ditetapkan dapat dicapai?

III. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan:

1. makna-makna budaya yang dimunculkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam Program Paket C,
2. signifikansi logis dari pemaknaan terhadap Program Kejar Paket C, dan
3. ketercapaian tujuan filosofi dari Program Kejar Paket C sebagaimana yang telah ditetapkan

IV. Manfaat Penelitian

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian keilmuan maka manfaat yang dapat diberikan lebih berkenaan dengan manfaat teoritis. Melalui penelitian *grounded (grounded research)* akan dirumuskan teori-teori substantif hasil kajian lapangan terhadap bidang pendidikan dengan sudut pandang kebudayaan (*cultural perspective*). Perumusan teori substantif ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan bagi bidang antropologi pendidikan. Namun demikian, hasil dari penelitian ini juga memiliki manfaat praktis, yaitu memberikan masukan bagi penyempurnaan Program Paket C. Melalui kajian reflektif maka temuan-temuan dalam penelitian ini, yang sifatnya pada tataran konteks local, ditarik benang merahnya pada tataran konteks yang lebih luas sehingga masukan yang ditawarkan bersifat lebih makro.

Bab II

Tinjauan Pustaka

I. Pendekatan Sosial dalam Pendidikan

Sanderson (1991) mengartikan pendidikan sebagai “bentuk sistem instruksi budaya atau intelektual yang diformalkan atau yang disemiformalkan”. Sementara itu, institusi pendidikan formal yang terpenting di masyarakat adalah sekolah. Namun, terdapat juga pendidikan luar sekolah baik yang bersifat pendidikan non-formal seperti misalnya kursus, maupun yang bersifat informal seperti pendidikan yang terjadi di rumah atau melalui media massa. Berkaitan dengan pendidikan nonformal, sebagaimana dicuplik oleh Sudjana (2004), Coombs menyatakan bahwa “pendidikan nonformal ialah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis, di luar system persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya” (Syamsi: 2010: 59).

Menurut Randal (Sanderson, 1991) terdapat tiga tipe dasar pendidikan yaitu: (1) *education in practical skills* (pendidikan keterampilan praktis), (2) *status group education* (pendidikan kelompok status), dan (3) *bureaucratic education* (pendidikan birokratis). Pendidikan keterampilan praktis adalah pendidikan yang didisain untuk membentuk kemampuan teknikal dalam rangka memenuhi kebutuhan lapangan kerja. Sementara itu, Pendidikan kelompok status adalah pendidikan yang ditujukan untuk memperkuat *prestige* (harga diri) dan *privileges* (hak-hak istimewa) dari kelompok elit pada masyarakat yang sangat terstratifikasi. Pendidikan birokratis adalah pendidikan yang dibentuk oleh pemerintah untuk memenuhi tugas menyeleksi orang-orang yang dibutuhkan oleh pemerintah atau posisi lainnya.

Dalam ilmu antropologi dan sosiologi, kajian terhadap bidang pendidikan mengacu pada pada tiga pendekatan yaitu 1) teori fungsionalis, 2) teori konflik Marxis, dan 3) teori konflik Weber. Menurut pendekatan Fungsionalisme (Sanderson, 1991), pendidikan dianggap mampu memberikan sumbangan positif bagi masyarakat industri. Terdapat tiga prinsip utama dari pendekatan Fungsionalisme (Collins, 1979 dalam Sanderson, 1991). *Pertama*, perubahan teknologi membawa konsekuensi pada kebutuhan akan pendidikan bagi pekerja-pekerja pada masyarakat industri. *Kedua*, pelatihan (*training*) bagi orang-orang yang ingin memperoleh pekerjaan yang membutuhkan *skill* (ketrampilan) yang tinggi disediakan melalui pendidikan formal. *Ketiga*, kebutuhan pendidikan bagi pekerja meningkat secara terus menerus.

Sementara itu, Bowles dan Gintis, penganut Teori Konflik Marxis, mengemukakan tentang *correspondence principle* (Sanderson, 1991) yang menyatakan bahwa karakteristik hubungan sosial yang berlaku di dunia pendidikan merupakan refleksi dari hubungan sosial yang berlaku di dalam dunia ekonomi dan tempat kerja. Artinya, nilai-nilai yang disosialisasikan di sekolah adalah nilai-nilai yang cocok bagi peran murid di dunia kerja nantinya. Bowles dan Gintis juga berpendapat bahwa *mass public education*, sebagai bentuk dari ekspansi pendidikan tinggi secara besar-besaran, merupakan respon kapitalis terhadap peningkatan kebutuhan pegawai untuk pekerjaan-pekerjaan teknik, clerk, dan *white-collar* (manajer), disamping juga karena adanya kebutuhan kelompok subordinat untuk dapat memperoleh kesempatan mencapai jenjang pendidikan tinggi.

Pendekatan lainnya berasal dari Randall Collins yaitu Teori Konflik Weber (Sanderson, 1991), yang bersumber dari konsepsi Max Weber mengenai konsep *status group*. Menurut Collins, dalam pembentukan sistem pendidikan maka *status group* dianggap lebih penting daripada kelas sosial. Collins menyatakan bahwa bagi kelompok dominan pendidikan merupakan sarana untuk mengatur dan mempertahankan dominasi kebudayaan dan ekonominya. Sementara di pihak lain kelompok subordinat memanfaatkan pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan status ekonominya. Dengan demikian, pendidikan telah menjadi arena bagi kelompok-kelompok yang berbeda dalam usahanya mencapai keberhasilan ekonomi.

II. PKBM sebagai Pendidikan Luar Sekolah

Pendidikan Luar Sekolah (PLS) termasuk pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal menurut Mambili (dalam, Syamsi, 2010:60) *can be operationally defined as an organized, structured, and systematic service delivered outside the framework of formal school system to a specific group (s) of people for a specific objective, at low cost in terms of both time and resources*". Sementara itu, menurut Napitupulu (1981, dalam Syamsi, 2010:60), PLS adalah "setiap usaha pelayanan pendidikan yang diselenggarakan di luar system sekolah, berlangsung seumur hidup, dijalankan dengan sengaja, teratur dan berencana yang bertujuan untuk mengaktualisasi potensi manusia (sikap, tindak, dan karya) sehingga dapat terwujud manusia seutuhnya yang gemar belajar mengajar dan mampu meningkatkan taraf hidupnya. Dari kedua pendapat tersebut dapat disarikan bahwa PLS atau pendidikan nonformal merupakan institusi pendidikan di luar pendidikan formal namun tetap diselenggarakan secara terstruktur dan sistematis.

Sebagai upaya memberikan akses pendidikan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses pendidikan formal maka PLS memiliki peran yang sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, menurut Sudjana (2004, dalam Syamsi, 2010), PLS *pertama* harus proaktif dalam mereformasi visi, misi, dan strateginya untuk mengubah program-program pendidikan yang sedianya berorientasi untuk menghasilkan para lulusan sebagai pencari kerja (*worker society*) menjadi upaya menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk mandiri dan pencipta lapangan kerja (*employee society*). Kedua, unsure-unsur pendidikan nonformal perlu dilakukan secara lengkap dan utuh, yaitu mencakup komponen, proses, dan tujuan. Ketiga, meningkatkan visi, misi, dan strategi pengembangan pendidikan nonformal. Keempat, pendidikan nonformal meningkatkan orientasi keberpihakannya kepada orang banyak. Kelima, pendidikan nonformal perlu mengembangkan tiga aspek (triad) pembinaan internal kelembagaannya dengan upaya penelitian, manajemen, dan produksi. Keenam, dalam meningkatkan misi pendidikan nonformal yang demikian luas maka lembaga-lembaga penyelenggara dan pelaksana program-program pendidikan tidak dapat bekerja sendiri-sendiri tanpa ada keterkaitan dengan pihak-pihak lain. Salah satu bentuk dari PLS adalah PKBM, yaitu singkatan dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

Pusat kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang merupakan tindak lanjut dari gagasan *Community Learning Center* telah dikenal di Indonesia sejak tahun enam puluhan serta respon terhadap kebijakan tentang *broad based learning* dari UNESCO. Secara kelembagaan, perintisannya di Indonesia dengan nama PKBM baru dimulai pada tahun 1998 sejalan dengan upaya untuk memperluas kesempatan masyarakat memperoleh layanan pendidikan (Sudjana, 2003, 2).

PKBM adalah tempat pembelajaran dalam bentuk berbagai macam keterampilan dengan memanfaatkan sarana, prasarana, dan segala potensi yang ada di sekitar lingkungan kehidupan masyarakat, agar masyarakat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan dan memperbaiki taraf hidupnya (BPKB Jatim, 2000, 6). Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ini merupakan salah satu alternatif yang dipilih dan dijadikan sebagai ajang proses pemberdayaan masyarakat. Hal ini selaras dengan adanya pemikiran bahwa dengan melembagakan PKBM maka akan banyak potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang selama ini belum dikembangkan secara maksimal. PKBM diarahkan untuk dapat mengembangkan potensi-potensi tersebut menjadi bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

Pada prinsipnya PKBM dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan memperhatikan segala potensi yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu dalam proses pembentukan dan penyelenggaraannya lebih menggunakan metode/pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yang secara garis besar prinsip-prinsipnya meliputi: belajar dari masyarakat, masyarakat sebagai subyek, saling membelajarkan, pemberdayaan masyarakat, focus pada potensi dan penyadaran, perumusan masalah dan penentuan prioritas, identifikasi pemecahan masalah, pemilihan alternatif pemecahan, perencanaan dan penyajian rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan supervisi, dan evaluasi (BPKB Jatim. 2000. 11).

Sebagai bentuk aplikasi prinsip-prinsip PRA tersebut maka dalam proses pembentukan maupun penyelenggaraan pembelajaran harus dilakukan pendekatan kepada masyarakat. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap mempunyai pengaruh di desa/kelurahan, misalnya kiai, ketua RT/RW, lurah/kepala desa, dan lain-lain. Tujuan pendekatan ini adalah untuk mengakrabkan terhadap masyarakat dengan program PKBM yang akan diselenggarakan. Dalam pendekatan ini masyarakat diperkenalkan dengan berbagai masalah serta adanya potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang mungkin dapat menunjang pelaksanaan program. Pendekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat dengan memberikan kesempatan untuk menentukan calon penyelenggara sendiri sesuai dengan yang diharapkan oleh warga masyarakat. Agar tugas penyelenggaraan dalam kegiatan PKBM lebih mudah, maka susunan organisasi penyelenggaraan PKBM melibatkan instansi pemerintah, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mitra kerja, dan pemakai jasa (BPKB Jawa Timur. 2000. 13).

Dengan demikian, PKBM dengan posisi sebagai institusi pendidikan yang berbasis pada masyarakat (*community based education*) harus mencerminkan adanya (1) dukungan dari masyarakat dalam berbagai bentuk; (2) keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan; (3) kemitraan di mana warga masyarakat ikut menjalin hubungan yang sejajar dengan pengelola program; (4) kepemilikan di mana warga masyarakat ikut mengendalikan semua keputusan yang berkaitan dengan program-program pendidikan luar sekolah. Dilihat dari layanan program maka PKBM memiliki berbagai potensi. PKBM memiliki potensi untuk menyelenggarakan seluruh program pendidikan nonformal dan informal, yang mencakup: pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran,

PKBM dapat menerapkan prinsip belajar kelompok dimana warga belajar dapat melaksanakan kegiatan belajar bersama warga belajar yang lain dalam suatu kelompok belajar. Disamping itu, juga PKBM juga dapat melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan integratif, dimana suatu proses pembelajaran tidak hanya menekankan pada pembelajaran satu aspek tertentu saja dari sekian banyak aspek kehidupan manusia tetapi suatu proses yang memadukan berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam suatu layanan program pembelajaran pendidikan luar sekolah. Potensi lain yang dimiliki PKBM sebagai institusi pembelajaran masyarakat adalah kemampuan dalam bekerja sama secara kolaboratif dan sinergis dengan berbagai institusi lain yang ada di dalam masyarakat baik yang menyelenggarakan aktivitas pendidikan maupun aktivitas lain yang memiliki tujuan yang sejalan dengan PKBM yaitu membangkitkan masyarakat dari berbagai ketertinggalan. PKBM dalam proses pembelajaran menempatkan sasaran warga belajar masyarakat sebagai subjek didik yang harus aktif melaksanakan kegiatan pembelajaran bagi dirinya dan masyarakat, PKBM memosisikan warga belajar sebagai individu yang memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan diri, masyarakat dan institusi PKBM itu sendiri, Sebagai institusi yang berada di dalam masyarakat dan didirikan dengan maksud untuk membelajarkan masyarakat, maka kehadiran PKBM berpotensi untuk memberdayakan masyarakat secara keseluruhan dalam arti dapat membantu kelompok-kelompok marginal agar mereka mampu memiliki potensi yang seimbang dengan kelompok-kelompok lainnya yang lebih mampan kehidupan sosial ekonominya, dengan menyediakan layanan pendidikan yang terjangkau sehingga dapat terangkat derajatnya, hak-haknya baik social maupun ekonomi.

Perbedaan perkembangan PKBM lebih disebabkan oleh perbedaan dalam komponen-komponennya: (1) adanya perbedaan dalam kepemilikan karena ada PKBM yang dimiliki perorangan, yayasan, pondok pesantren, LSM, desa, dan sebagainya, (2) perbedaan sumber daya manusia yang mengelola, (3) perbedaan karena kemampuan dana walaupun ada dana bantuan dari pemerintah, (4) perbedaan dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki masing-masing PKBM, dan (5) perbedaan dalam jumlah dan jenis layanan program pendidikan yang diselenggarakan oleh PKBM. Atas dasar karakteristik pengelolaannya, PKBM dalam diklasifikasikan menjadi tiga bentuk yaitu: (1) PKBM yang berbasis kelembagaan, yaitu PKBM yang inisiatif pembentukan dan pengelolaan dilakukan oleh lembaga pemerintah atau non pemerintah, ciri utamanya semua sarana dan prasarana termasuk dana disediakan oleh lembaga, (2) PKBM yang berbasis komprehensif, yaitu PKBM yang inisiatif pembentukannya dari lembaga namun dalam pengelolaannya dilakukan secara bersama dengan masyarakat sekitar, dan (3) PKBM berbasis masyarakat,

merupakan PKBM yang inisiatif pembentukan, pengelolaan dan penyelenggaraan dari dan oleh masyarakat, unsur lain lebih berperan sebagai mitra dan fasilitator

III. Modal Manusia (*Human Capital*)

Teori *Human Capital* pertama kali diperkenalkan pada sekitar tahun 1960-an sampai 1970-an. Kajian ini menjadi semakin menarik perhatian melalui kajian-kajian yang dilakukan oleh Schultz, Denison, Balug, Mincer and Becker. Selanjutnya pada sekitar tahun 1980-an Romer, Lucas dan ahli-ahli lainnya mulai menekankan sumbangan yang dapat diberikan oleh bidang pendidikan bagi pertumbuhan ekonomi. Pada perkembangan selanjutnya, sejalan dengan perkembangan metode analisis, ketersediaan data yang semakin berkualitas dan cakupan yang lebih luas, serta cara baru dalam melakukan investigasi menjadikan semakin banyaknya kajian-kajian yang menggunakan pendekatan *Human Capital* ini. Lebih jauh lagi reaksi terhadap globalisasi ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi, pemerintahan, dan kebijakan-kebijakan lainnya menempatkan pentingnya mengkaji tujuan ekonomi dari pendidikan, khususnya pengembangan *Human Capital* (Gilead, 2009).

Pada awalnya, bidang ekonomi pendidikan dilihat dari dua perspektif dengan cara yang berbeda. Bidang ekonomi pendidikan lebih diterima sebagai kajian dari para ahli ekonomi, sementara ahli-ahli ilmu sosial tidak menaruh perhatian yang cukup pada tujuan ekonomi dari penyelenggaraan pendidikan. Ahli filsafat pendidikan cenderung tidak menaruh perhatian pada tujuan ekonomi dari pendidikan. Sementara ahli ekonomi yang mengkaji bidang pendidikan cenderung menghindari diskusi tentang aspek filosofi dari pendidikan.

Terkait dengan Teori *Human Capital*, Schultz (dalam Gilead, 2009) berargumentasi bahwa keterampilan dan pengetahuan harus diperhitungkan sebagai bentuk dari kapital/modal. Hal ini untuk memberikan dasar bagi penjelasan tentang percepatan pertumbuhan ekonomi yang dicirikan oleh kondisi masyarakat Barat setelah Perang Dunia ke-2. Bagi Schultz, pendidikan harus diperhitungkan sebagai investasi yang akan memberikan keuntungan ekonomi bagi individu dan masyarakat.

Pokok pikiran Teori *Human Capital* dapat ditelusuri juga dari pendapat Becker (dalam Gilead, 2009) yang berpendapat bahwa di dalam menentukan pendidikannya maka individu akan mendasarkan pilihannya secara rasional untuk memaksimalkan keuntungan. Di samping itu, yang menjadi bahan pertimbangan adalah perbandingan antara tujuan-tujuan nonmoneter dan tujuan budaya yang akan diperolehnya bersamaan dengan peningkatan pendapatan dan level/status pekerjaan berbanding dengan biaya ekonomi dan biaya sosial yang harus dikeluarkan. Dari pendapat Becker ini dapat disimpulkan bahwa investasi pendidikan yang

dilakukan individu merupakan keputusan ekonomi yang sifatnya rasional karena didasari pada pertimbangan dapat mendatangkan keuntungan. Sementara itu, rasional di sini oleh Becker diartikan sebagai tindakan untuk memilih dari serangkaian pilihan dan memaksimalkan informasi yang diperolehnya dalam rangka memaksimalkan keuntungan. Sementara itu, keuntungan diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kesejahteraan subyektif. Tindakan rasional ini kadang-kadang tidak selalu disadari individu, artinya individu tidak selalu menyadari bahwa upayanya adalah untuk mendatangkan keuntungan.

Sebagai sebuah paradigm berpikir, pokok pikiran Teori *Human Capital* tentu mendapat respon dari berbagai pihak. Salah satu respon berasal dari Bartlett (2007) yang mengkritisi Teori *Human Capital* melalui hasil penelitiannya. Melalui hasil penelitiannya, Bartlett berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan peserta didik tidak berasal dari hasil pembelajaran melainkan berasal dari cara bagaimana peserta didik tersebut memanfaatkan jaringan sosial yang dimilikinya di lingkungan tempat pendidikan tersebut. Dari hasil penelitiannya, Bartlett menghasilkan dua konsep yaitu *sociability* dan *manners* yang menurut subyek penelitiannya adalah perilaku yang harus dikembangkan dalam rangka membentuk dan memanfaatkan jaringan sosial. *Sociability* diartikan sebagai mengembangkan perilaku sebagaimana yang seharusnya dalam rangka berinteraksi dengan *peergroup*. Sementara itu, *manners* diartikan sebagai mengembangkan perilaku sebagaimana yang seharusnya dalam rangka berinteraksi dengan orang yang lebih berpengaruh (*superior*). Pendapat Bartlett ini mengacu pada pemikiran Herve Varenne (2007, dalam Bartlett, 2007) yang memandang pendidikan sebagai arena interaksi, yaitu upaya individu memodifikasi tindakannya dalam rangka mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan keuntungan baginya.

IV. Theory of Meaningful Social Action

Weber sering dikatakan sebagai bapak sosiologi. Bagi Weber sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan sosial sebagaimana pernyataannya bahwa "Sociology... is a science which attempts the interpretive understanding of social action in order thereby to arrive at a casual explanation of its course and effects" (Weber, 1964:88). Suatu tindakan hanya dapat disebut tindakan social apabila tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain, dan berorientasi pada perilaku orang lain. Menurut Weber, suatu tindakan ialah perilaku manusia yang mempunyai makna subyektif bagi pelakunya.

Menurut Weber, terdapat tiga jenis tindakan social, yaitu (1) tindakan social yang didasarkan pada tradisi, (2) tindakan social yang didasarkan pada tekanan, dan (3) tindakan social yang didasarkan pada rasionalitas. Ciri dari hubungan rasional adalah hubungan sosial yang bersifat asosiatif dan orientasi tindakan sosial berdasarkan pada sebuah penyesuaian kepentingan-kepentingan yang di motivasi secara rasional atau persetujuan yang di motivasi secara sama. Weber menggunakan konsep rasionalitas dalam klasifikasinya mengenai tipe-tipe tindakan sosial. Menurut Max Weber, tindakan rasional adalah tindakan manusia yang dapat mempengaruhi individu-individu lain dalam masyarakat. Weber membagi tindakan rasional ini kepada empat jenis atau bentuk. Pertama ialah tindakan rasional instrumental yaitu tindakan yang diarahkan secara rasional untuk mencapai sesuatu tujuan yang tertentu. Kedua ialah tindakan rasional nilai yaitu tindakan yang akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan atas dasar keyakinan seseorang individu terhadap nilai-nilai estetika, etika atau keagamaan. Ketiga ialah tindakan emosional yaitu segala tindakan seseorang individu yang akan dipengaruhi oleh perasaan dan emosi. Jenis atau bentuk tindakan terakhir yang dinyatakan oleh Max Weber ialah tindakan tradisonal yaitu tindakan di mana seseorang akan melakukan suatu tindakan hanya karena mengikuti amalan tradisi atau kebiasaan yang telah berlaku.

Meski dipengaruhi perkembangan teori pertukaran, teori pilihan rasional umumnya berada di pinggir aliran utama teori sosiologi (Hechter dan Kanazawa, 1997). Melalui upaya James S. Coleman, teori ini menjadi salah satu teori "hebat" dalam sosiologi masa kini. Dikatakan demikian karena tahun 1989 Coleman mendirikan jurnal *Rationality and Society* yang bertujuan menyebarkan pemikiran yang berasal dari perspektif pilihan rasional. Selain itu, Coleman (1990) menerbitkan buku yang sangat berpengaruh, *Foundations of Social Theory* berdasarkan perspektif pilihan rasional itu. Terakhir, Coleman menjadi presiden the American Sociological Association tahun 1992 dan memanfaatkan forum itu untuk mendorong kemajuan teori pilihan rasional dan menamainya "The Rasional Reconstruction of Society". Teori pilihan rasional adalah satu-satunya teori yang mungkin menghasilkan integrasi berbagai paradigma sosiologi. Coleman dengan yakin menyatakan bahwa pendekatannya beroperasi mulai dari dasar metodologi individualisme dan dapat menggunakan teori pilihan rasional sebagai landasan tingkat mikro untuk menjelaskan fenomena tingkat makro. Landasan Teori Sosial Menurut Coleman sosiologi seharusnya memusatkan perhatian kepada system social. Tetapi fenomena makro itu harus dijelaskan oleh faktor internalnya sendiri, khususnya oleh factor individual. Ia lebih menyukai bekerja di tingkat individual ini karena berbagai alasan, termasuk kenyataan bahwa data biasanya

dikumpulkan di tingkat individual dan kemudian disusun untuk menghasilkan data di tingkat sistem sosial. Alasan lain untuk lebih menyukai pemusatan perhatian di tingkat individual biasanya adalah karena “intervensi” dilakukan untuk menciptakan perubahan sosial. Inti perspektif Coleman adalah gagasan bahwa teori sosial tak hanya merupakan latihan akademis, tetapi harus dapat mempengaruhi kehidupan sosial melalui “intervensi” tersebut.

Dengan memusatkan perhatian pada individu ini, Coleman mengakui bahwa ia adalah individualis secara metodologis, meski ia melihat perspektif khusus ini sebagai varian khusus dari orientasi individu itu. Pandangannya adalah khusus dalam arti bahwa ia menerima gagasan yang muncul dan meski memusatkan perhatian pada faktor internal sistem sosial, faktor itu tak mesti selalu orientasi dan tindakan individual. Artinya fenomena tingkat mikro selain yang bersifat individual pun dapat menjadi sasaran perhatian analisisnya.

Teori pilihan rasional Coleman tampak jelas gagasan dasarnya bahwa “tindakan perseorangan mengarah kepada sesuatu tujuan dan tujuan itu (dan juga tindakan) ditentukan oleh nilai atau pilihan (preferensi)”. Tetapi, Coleman selanjutnya menyatakan untuk maksud yang sangat teoritis, ia memerlukan konsep yang lebih tepat mengenai aktor rasional yang berasal dari ilmu ekonomi yang melihat aktor memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau yang memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka

V. Tafsir Budaya (*Cultural Interpretation*)

Karena sosiologi bertujuan memahami (*Verstehen*) mengapa tindakan sosial mempunyai arah dan akibat tertentu, sedangkan tiap tindakan mempunyai makna subyektif bagi pelakunya, maka ahli sosiologi yang hendak melakukan penafsiran makna, yang hendak memahami makna subyektif suatu tindakan sosial harus dapat membayangkan dirinya di tempat pelaku untuk dapat ikut menghayati pengalamannya (*put one's self imaginatively in the place of the actor and thus sympathetically to participate in his experiences*).

Pendekatan interpretif memusatkan perhatian pada berbagai wujud konkret dari makna kebudayaan. Pendekatan interpretif memandang dunia sebagai lingkaran makna. Menurut pendekatan interpretif sasaran kajian adalah interpretasi dari praktik-praktik manusia yang bermakna dengan penekanan pada pemahaman yaitu menemukan makna suatu kejadian atau praktik sosial dalam konteks tertentu. Tujuan dari penelitian adalah melakukan rekonstruksi makna atau menemukan signifikansi dari kejadian atau praktik sosial. Pokok pikiran dari pendekatan interpretif antara lain adalah (1) tindakan dan keyakinan individu hanya dapat dipahami melalui interpretasi dalam rangka menemukan makna atau signifikansi tindakan

atau keyakinan tersebut bagi pelaku, dan (2) praktik-praktik sosial dimanifestasikan oleh makna yang diberikan oleh para pelaku kepada praktik tersebut (Saifuddin, 2006).

Berkaitan dengan sistem makna, Clifford Geertz mendefinisikan kebudayaan sebagai *pertama*, “suatu sistem keteraturan dari makna dan simbol-simbol yang dengan makna dan simbol tersebut individu-individu mendefinisikan dunia mereka, mengekspresikan perasaan-perasaan mereka, dan membuat penilaian. *Kedua*, kebudayaan diartikan sebagai suatu pola makna-makna yang ditransmisikan secara historis yang terkandung dalam bentuk-bentuk simbolik yang mana melalui bentuk-bentuk simbolik ini manusia berkomunikasi, memantapkan dan mengembangkan pengetahuan mereka mengenai dan bersikap terhadap kehidupan. *Ketiga*, kebudayaan adalah suatu peralatan simbolik yang berperan mengontrol perilaku. *Keempat*, oleh karena kebudayaan adalah suatu sistem simbol maka proses kebudayaan harus dipahami, diterjemahkan, dan diinterpretasikan (Saifuddin, 2006).

Berkaitan dengan pendekatan interpretif, Clifford Geertz menegaskan bahwa kajian lapangan tidak hanya meneliti sebuah masyarakat tetapi juga meneliti suatu sistem, ide, adat istiadat sikap, simbol, dan institusi yang lebih luas di mana masyarakat hanyalah suatu bagian. Artinya, antropologi lebih menitikberatkan pada kajian budaya daripada kajian masyarakat. Kebudayaan sendiri dilihat sebagai produk dari tindakan manusia. Kebudayaan adalah karena melakukan hal-hal yang sesuai dengan beberapa ide, sikap, dan nilai. Implikasi logisnya, untuk dapat menjelaskan apa yang sedang berlangsung maka harus memahami arti/makna suatu tindakan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sejalan dengan pemikiran ini, Talcott Parsons menyatakan bahwa suatu sistem budaya adalah obyektif sistem simbol, tanda, isyarat, kata-kata peristiwa yang membentuk sikap dan membimbing tindakan (Fitria, 2012). Berangkat dari pemikiran ini, Geertz melihat kebudayaan sebagai sebuah makna atau yang diistilahkannya dengan signifikansi. Dengan demikian, menurutnya sebuah analisis budaya bukanlah suatu sains eksperimental yang mencari suatu kaidah, melainkan sebuah sains interpretatif yang mencari makna.

Bab III

Metode dan Setting Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *grounded research*. Sebagai *grounded research* maka tendensi dari penelitian ini adalah menemukan konstruksi teori melalui proses analisis dan abstraksi data empirik.

2. Setting Penelitian

Setting dalam penelitian ini adalah Program Kejar Paket C pada (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Brigade yang berlokasi di SMK Nusa Bangsa, jalan Raya Jampang Parung, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Unit observasi dalam penelitian ini adalah peristiwa pada lingkungan pembelajaran Program Paket C di PKBM Brigade.

3. Culture Scene

Culture scene adalah kelompok dan subkelompok yang menjadi sasaran observasi dalam penelitian. *Culture Scene* dari lingkungan pembelajaran Program Paket C di PKBM Brigade yang menjadi sasaran observasi tersaji sebagaimana tabel berikut ini.

Kelompok	Subkelompok
Peserta/siswa	Jenis kelamin
	Usia
	Tahun kelulusan SMP/ sederajat
	Pekerjaan Pokok
	Domisili
Guru	Tetap/honorer
	Latar belakang pekerjaan
	Jenis kelamin
	Usia
	Latar belakang pendidikan
Pengelola	Pengurus sanggar belajar
	Pemilik sanggar belajar
	Jajaran dinas pendidikan

Kurikulum	Kompetensi
	Mata ajar
Materi belajar	Substansi
	Penyajian
Pengajaran	Cara penyampaian
	Penggunaan alat peraga
Evaluasi/penilaian	Aspek evaluasi
	Cara evaluasi
Ruang kelas	Kelayakan (ukuran kelas, kebersihan, penerangan, pergantian udara, dll)
	Status Kepemilikan
Interaksi	Sesama siswa
	Guru siswa
	Guru dan guru

Melalui observasi terhadap *Culture Scene* dari lingkungan pembelajaran Program Paket C di PKBM Brigade tergambar peristiwa yang terjadi pada lingkungan pembelajaran tersebut yang melibatkan semua kelompok dan subkelompok yang ada. Selanjutnya melalui wawancara dengan individu-individu yang terjalin dalam peristiwa tersebut dapat diungkapkan gagasan-gagasan atau makna yang melatarbelakangi berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungan tersebut.

4. Pengumpulan dan Analisis Data

Dalam melakukan pengumpulan data empirik, peneliti menggunakan asisten peneliti yang secara bergantian dengan peneliti melakukan observasi terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam lingkungan pembelajaran Program Paket C di PKBM Brigade. Hal ini terpaksa dilakukan dikarenakan peneliti tidak memiliki waktu penuh untuk melakukan penelitian lapangan. Untuk penelitian etnografi, kehadiran peneliti secara penuh di lapangan memang menjadi keharusan dikarenakan peneliti merupakan instrumen utama penelitian agar tidak terjadi bias dalam mengumpulkan, melakukan analisis, dan interpretasi terhadap data yang ada. Kelemahan ini peneliti sadari sepenuhnya sehingga secara intens peneliti selalu melakukan diskusi dengan asisten peneliti setiap kali asisten peneliti selesai mengumpulkan data. Disamping itu, bersama dengan asisten peneliti, peneliti merumuskan

kembali data-data apa yang harus dikumpulkan dan cara mengumpulkannya. Peneliti juga memperkenalkan asisten peneliti kepada *key informan*.

Observasi dilakukan melalui observasi nonpartisipasi. Observasi nonpartisipasi dipilih dengan alasan tidak tersedianya waktu yang cukup untuk melakukan penelitian lapangan, yaitu hanya sekitar sepuluh kali kunjungan. Di samping itu, peneliti dan asisten peneliti juga tidak memiliki waktu untuk menjalin *rapport* atau kedekatan dengan pelaku peristiwa sebelum pengumpulan data yang sesungguhnya dilakukan. Hal ini tentu saja menjadi kelemahan penelitian dikarenakan informan akan secara nyaman dan terbuka mengungkapkan pikirannya apabila telah terjadi kedekatan dengan peneliti. Untuk mengatasi kelemahan ini maka peneliti dan asisten peneliti harus mampu menciptakan keyakinan kepada informan untuk bersedia dan nyaman mengungkapkan pikirannya.

Observasi dilakukan dengan menggunakan pedoman observasi yang dikembangkan dengan mengacu pada *culture scene*. Peristiwa yang diobservasi adalah kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kegiatan pada saat istirahat dan seusai kelas, dan kegiatan di dalam ruang pengurus. Observasi kegiatan di dalam kelas dilakukan dengan mengamati interaksi guru dan murid, interaksi murid dan murid, interaksi guru/murid dengan lingkungan dalam kelas, perilaku guru ketika mengajar, dan perilaku murid ketika mengikuti pembelajaran. Observasi kegiatan pada saat istirahat dan seusai kelas dilakukan untuk mengamati perilaku guru, murid, dan pengelola pada tersebut serta interaksi mereka dengan lingkungan luar kelas. Sementara itu, observasi terhadap kegiatan di dalam ruang pengurus dilakukan untuk mengamati interaksi antar guru, murid, dan pengelola serta interaksi mereka dengan lingkungan di dalam ruang pengurus. Observasi dilakukan melalui perekaman video maupun observasi langsung.

Untuk mendalami hasil observasi, yaitu mengungkapkan pikiran para pelaku peristiwa maka peneliti dan asisten peneliti melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang sudah disiapkan. Namun demikian, pertanyaan wawancara juga dikembangkan mengikuti alur jawaban informan. Wawancara dilakukan secara formal dan informal. Wawancara secara formal dilakukan dengan memberitahukan terlebih dulu kepada informan bahwa peneliti/asisten peneliti akan melakukan wawancara. Sementara itu, wawancara informal dilakukan dalam suasana berbincang di mana peneliti/asisten peneliti tidak memberitahukan sedang melakukan wawancara. Wawancara dilakukan di berbagai tempat sesuai dengan kesepakatan peneliti/asisten peneliti dengan informan dan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Wawancara adakalanya direkam

baik melalui audio maupun hanya dicatat sesuai dengan kesepakatan serta situasi dan kondisi yang ada.

Setiap kali melakukan pengumpulan data lapangan maka peneliti/asisten peneliti langsung melakukan transkrip data yaitu menuangkan hasil pengumpulan data lapangan ke dalam catatan harian. Apabila tidak memungkinkan menuangkan pada saat di lapangan maka peneliti/asisten peneliti langsung menuangkannya setiap kali selesai melakukan kegiatan pengumpulan data. Catatan lapangan yang dibuat berisi gambaran rinci atas suatu peristiwa yang diobservasi dan hasil wawancara. Catatan ini bukan merupakan ringkasan atau evaluasi, melainkan deskripsi riil dari peristiwa yang diobservasi dan ungkapan-ungkapan yang diberikan oleh informan. Di samping itu, perilaku, perasaan, dan pemikiran dari peneliti juga perlu dimasukkan dalam catatan. Hal ini untuk meminimalkan bias peneliti atas observasi dan wawancara yang dilakukan.

Selanjutnya terhadap data yang telah terkumpul dilakukan *coding* dan kategorisasi data dengan mengacu pada kelompok dan subkelompok pada *culture scene*. Hasil dari coding dan kategorisasi tersebut dijadikan dasar untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan baru atau menyusun kembali pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dalam pedoman observasi dan pedoman wawancara. Demikian terus menerus dilakukan hingga data yang terkumpul sudah mencukupi kebutuhan penelitian. Sepanjang kegiatan pengumpulan data ini dilakukan reduksi dan penambahan data.

Coding dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan memberikan label terhadap unit-unit yang bermakna. Unit ini bisa berupa kata, kalimat, ataupun paragraf. Sebagai contoh, pernyataan informan: “.. ya seperti yang kita tahu, mereka masuk paket C karena mencari ijasah ..”. Pernyataan ini diidentifikasi sebagai alasan peserta mengikuti program paket C dan diberi label motivasi. Selanjutnya unit-unit yang memiliki kemiripan disatukan membentuk suatu kategori yang sifatnya spesifik. Selanjutnya setelah terbentuk kategori-kategori spesifik maka data-data dalam kategori spesifik tersebut disajikan dalam suatu uraian deskriptif. Dari kategori-kategori spesifik ini selanjutnya dibentuk kategori baru yang sifatnya lebih luas. Demikian terus menerus dilakukan. Dengan demikian, analisis data bersifat induktif. Setiap kali melakukan kategorisasi maka dilakukan pengujian data untuk meyakinkan data yang ada dalam suatu kategori bersifat mendukung keseluruhan. Pengujian data dilakukan dengan cara triangulasi, yaitu menguji data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Kegiatan selanjutnya adalah membuat hubungan antarkategori di mana hubungan antarkategori ini diuji untuk meyakinkan hubungan antarkategori tersebut mendukung peristiwa keseluruhan. Hasil analisis ini pada akhirnya

menghasilkan kategori inti. Untuk memberi gambaran keseluruhan peristiwa maka kategori inti ini dihubungkan dengan sub-sub kategori. Selanjutnya teori baru dibentuk melalui simpulan-simpulan atas hubungan antara kategori inti dengan sub-sub kategori.

Pengumpulan data selain dilakukan melalui observasi dan wawancara juga dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD). FGD dilakukan untuk mendiskusikan tema-tema tertentu. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner ini berperan sebagai data pendukung atas deskripsi kualitatif. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan metode *life history* untuk menggali pengalaman yang sifatnya individual. Penelitian ini juga tidak lepas dari kebutuhan akan data sekunder. Untuk itu, penelusuran dokumen terkait dengan Program Kejar Paket C juga dilakukan. Data hasil penelusuran dokumen merupakan data pendukung yang sifatnya penting karena mengandung informasi tentang lingkup program, peserta, pengelola, dan lain-lain. Berikan penjelasan tentang strategi peneliti, apakah akan berpura-pura sebagai peserta atau mengakui dirinya sebagai peneliti kepada subjek penelitian

Bab IV

Hasil dan Pembahasan

A. Dasar Hukum Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Terdapat beberapa definisi tentang “pendidikan” menurut para ahli, yaitu (<http://pengantarpendidikan.files.wordpress.com/2010/09/bab-i-pendidikan1.pdf>) :

- LANGEVELD
Pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepatnya membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh itu datangnya dari orang dewasa dan ditujukan kepada orang yang belum dewasa.
- JOHN DEWEY
Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia.
- J.J. ROUSSEAU
Pendidikan adalah member kita perbekalan yang tidak ada pada masa kanak-kanak, akan tetapi kita membutuhkannya pada waktu dewasa.
- DRIYARKARA
Pendidikan adalah pemanusiaan manusia muda atau pengangkatan manusia muda ke taraf insane.
- CARTER V. GOOD
 - a. *Pedagogy is the art, practice, or profession of teaching*
 - b. *The systematized learning or instruction concerning principles and methods of teaching and student control and guidance; largely replaced by the term education*
- KI HAJAR DEWANTARA
Pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya adalah pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan adalah pemanusiaan manusia muda atau pengangkatan manusia muda ke taraf *insane*.

Sementara itu, pendidikan menurut Sanderson (1991) adalah sebagai “bentuk sistem instruksi budaya atau intelektual yang diformalkan atau yang disemiformalkan”.

Bagi bangsa Indonesia, kebutuhan akan pendidikan bagi warganya diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 bahwa “tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran dan pasal 2 bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang” maka pemerintah merumuskan berbagai aturan berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan. Salah satu aturan yang diterbitkan dalam rangka melaksanakan amanah Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 dinyatakan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” Selanjutnya pada pasal 13 dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pasal 26 dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 juga menyatakan bahwa:

- pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat,
- pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional,
- pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik,
- satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis,
- kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,

- Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan,
- Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 termasuk pada kategori pendidikan nonformal. Lebih spesifik lagi PKBM dimasukkan pada Pendidikan Luar Sekolah sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah. Pada Bab II pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991 dinyatakan bahwa Pendidikan luar sekolah bertujuan untuk:

- Melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya,
- Membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat dan/atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan
- Memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah.

Selanjutnya, pada Bab VIII bagian ke-2 pasal 17 dinyatakan bahwa:

- Pendidikan Luar sekolah yang setara dengan pendidikan dasar diselenggarakan pada kelompok belajar Paket A dan kelompok belajar Paket B.
- Kelompok belajar Paket A diselenggarakan bagi sekumpulan warga belajar untuk memperoleh pendidikan setara dengan Sekolah Dasar.
- Kelompok belajar Paket B diselenggarakan bagi sekumpulan warga belajar untuk memperoleh pendidikan setara dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
- Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

Dari semua aturan hukum yang di dalamnya mengatur tentang PKBM maka hakikat penyelenggaraan PKBM adalah menyediakan pendidikan sepanjang hayat dalam rangka

mengembangkan diri dan profesi, agar peserta didik dapat meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya.

B. PKBM Brigade Sebagai Penyelenggara Program Kejar Paket C

a. Sejarah Pendirian PKBM Brigade

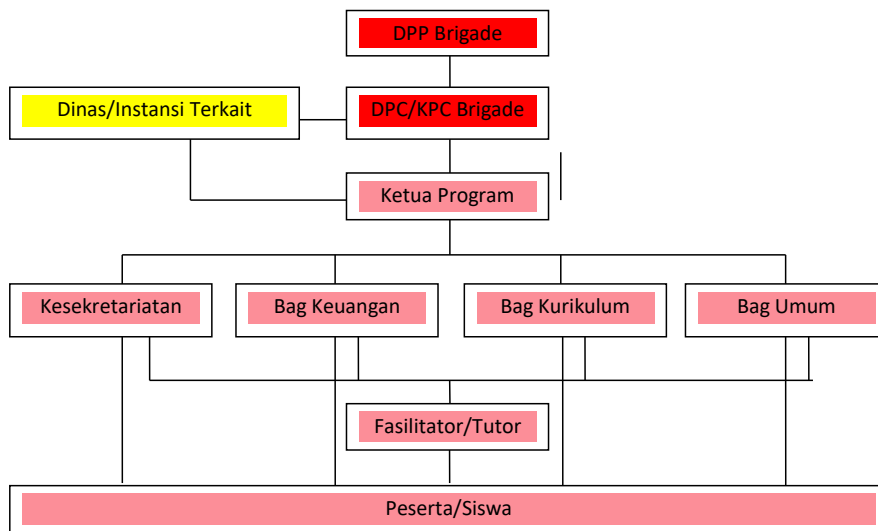
Nama Brigade sebagai nama PKBM berasal dari nama Ormas yang didirikan pada masa setelah reformasi (sekitar tahun 1998) yang berafiliasi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yaitu ormas Brigade yang kepanjangannya adalah Barisan Rakyat Penjaga Demokrasi. Dengan demikian logo PKBM Brigade identik dengan logo Ormas Brigade. Ormas Brigade dipimpin oleh Pius Lustrilanang dengan wilayah kerja sekitar Kabupaten Bogor. Pendirian PKBM Brigade merupakan implemetasi dari program Ormas Brigade untuk merumuskan dan melaksanakan bidang pendidikan dengan sasaran para calon anggota dan kader ormas. Prinsip dasar dari pendirian PKBM Brigade adalah pemikiran bahwa pendidikan pada dasarnya tidak bebas dari kepentingan politik, salah satunya adalah melanggengkan atau melegitimasi dominasi, sehingga pendidikan tidak lebih dari sarana untuk mereproduksi system dan struktur social yang menghasilkan system dan struktur relasi kelas, jender, rasisme, dan relasi lainnya. Melalui pendidikan, para pendiri PKBM Brigade ingin menumbuhkan kesadaran kritis tentang fenomena dari relasi-relasi tersebut. Disamping itu, para peserta didik juga diharapkan mampu mengusahakan langkah-langkah bagi penyelesaian masalah tersebut. Para pendiri PKBM Brigade berpandangan bahwa pendidikan bukan hanya terdiri dari pendidik dan peserta didik saja, melainkan termasuk di dalamnya adalah “kenyataan social” sehingga pendidikan bukan diarahkan bagi pencapaian masa depan melainkan sebagai sarana gerakan memerdekakan diri.

Dasar pemikiran pendirian PKBM Brigade ini tidak lepas dari sejarah politik ormas Brigade dan PDIP pada masa pemerintahan Orde Baru. Pada masa itu, PDIP adalah partai yang menyatakan oposisi bagi pemerintahan yang berkuasa. Sementara itu, Pius Lustrilanang adalah aktivis yang pernah mengalami penculikan dan penyekapan pada masa Orde Baru. Sebagai pihak yang terpinggirkan, maka pemikiran Paulo Freire mendominasi cara pandang mereka tentang hakikat pendidikan. Menurut Freire, yang merupakan tokoh aliran rekonstruksionisme, tujuan utama dari pendidikan adalah membuka mata peserta didik guna menyadari realitas ketertindasannya untuk kemudian bertindak melakukan transformasi social (<http://www.seabs.ac.id/journal/oktober2001/Mengenal> Filsafat Pendidikan Paulo Freire.pdf). Berkaitan dengan pemikiran Paulo Freire, George R. Knight menuliskan tiga prinsip utama dari aliran Rekonstruksionisme, yaitu (1) Peradaban dunia sedang berada dalam krisis di

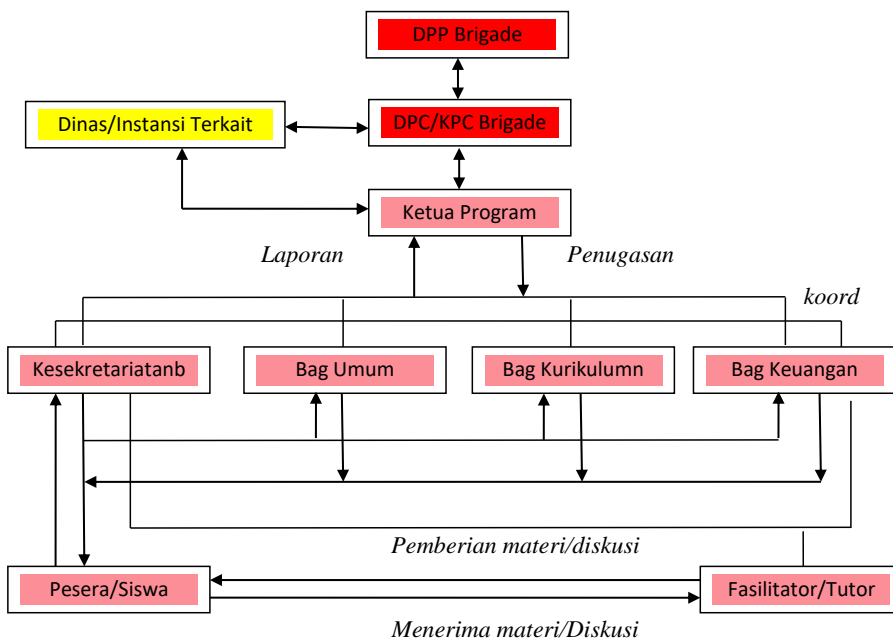
mana solusi efektifnya adalah penciptaan suatu tatanan sosial yang menyeluruh, (2) Pendidikan adalah salah satu agen utama untuk melakukan rekonstruksi terhadap tatanan sosial. Oleh karenanya, seorang pendidik rekonstruksionis harus secara aktif mendidik demi perubahan social, dan (3) Metode pengajaran harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis yang bertujuan untuk mengenali dan menjawab tantangan sosial yang ada (http://eprints.walisongo.ac.id/807/5/083111095_BAB3.pdf). Pemikiran Paulo Freire ini banyak mendapat pengaruh dari pemikiran Marxisme yang dipelopori oleh Karl Marx. Kaum Marxisme yang menaruh minat pada pendidikan dikenal sebagai penganut Pedagogi Kritis, dimana mereka memandang pendidikan memiliki fungsi di dalam system social hegemonic yang diorganisir untuk melayani kepentingan pemilik modal (http://eprints.uny.ac.id/698/1/Mengkaji_Fenomena_Pendidikan_Persekolahan_dari.pdf).

Dengan latar belakang politis tersebut PKBM Brigade didirikan pada tahun 2002, beberapa tahun setelah Orde Baru tumbang bersamaan dengan lengsernya Presiden Soeharto. PKBM Brigade didirikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor nomor 484/484-Disdik tentang Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat: Brigade yang dikeluarkan pada tanggal 1 Maret 2012, mengacu pada Surat Edaran Bupati Bogor nomor 421.9/276.sos tanggal 30 Agustus 2000 perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Drs. H. Didih Suwardi, MM. Dalam surat keputusan tersebut ditetapkan program yang dilaksanakan adalah (1) Kejar paket A setara SD, (2) Kejar paket B setara SLTP, dan (3) Kejar paket C setara SMU. Dalam surat keputusan tersebut juga ditetapkan Hengki Korah, ketua DPC Ormas Brigade di Jampang, sebagai ketua penyelenggaran dan salah satu penanggung jawab adalah Pius Lustrilanang.

Pada awal berdiri, struktur organisasi PKBM Brigade menunjukkan jenjang structural yang menempatkan PKBM Brigade berada di bawah naungan Ormas Brigade. Struktur organisasi PKBM Brigade pada awal berdiri adalah sebagai berikut.



Dalam pelaksanaan program, struktur organisasi tersebut dijabarkan dalam bagan skema hubungan manajemen antara PKBM Brigade dengan ormas Brigade sebagai berikut.



Gambaran struktur organisasi PKBM Brigade ini tidak lepas dari posisi Pius Lustrilanang, yang pada saat itu adalah Ketua DPP Brigade, sebagai inisiator dan penanggung jawab PKBM. Sebagaimana terlihat dari dasar pemikiran pendirian PKMB Brigade dan posisi PKBM sebagai bagian dari ormas Brigade maka dapat dikatakan bahwa PKBM Brigade merupakan wahana bagi gerakan politik ormas Brigade. Hal ini diperkuat dengan substansi Panduan Penyelenggaraan PKBM Brigade dimana pola rekrutmen pengurus PKBM mensyaratkan adanya rekomendasi dari DPC/KPC Brigade dan dipilih dari aktivis yang memiliki pemahaman mengenai pendidikan rakyat, gerakan rakyat, dan organisasi. Disamping itu, pada awal berdirinya, PKBM ini memang diperuntukkan khususnya bagi calon anggota dan kader ormas Brigade.

Namun, pada tahun 2007 surat ijin penyelenggaraan tersebut diperbaharui dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor nomor 421/1609-Diklus tentang Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) BRIGADE Desa Parakan Jaya Kecamatan Kemang yang diterbitkan pada tanggal 14 Mei 2007 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Drs. H. M. Endang Basuni, SH, MM, mengacu pada Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 120/17-Binsos tanggal 28 Juni 2000 tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di seluruh Jawa Barat dan Surat Edaran Bupati Bogor nomor 421.9/276.sos tanggal 30 Agustus 2000 perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di kabupaten Bogor. Dalam lampiran surat keputusan tersebut tertulis ketua penyelenggara adalah Drs. Mustar Manurung dimana tidak tercantum lagi Pius Lustrilanang sebagai penanggung jawab. Penggantian Bapak Hengki Korah oleh Bapak Manurung dikarenakan kesibukan aktivitas politik bapak Hengki sehingga tidak dapat fokus mengelola PKBM, sementara Bapak Manurung sebagai kader yang berprofesi sebagai guru atau orang yang berkecimpung di dunia pendidikan dinilai lebih tepat. Sementara itu program pendidikan yang diselenggarakan juga lebih bervariasi, yaitu (1) Kejar Paket Keaksaraan Fungsional, (2) Kejar Paket A setara SD, (3) Kejar Paket B setara SMP, (4) Kejar Paket C setara SMA, (5) Kelompok Belajar Usaha, (6) Program Beasiswa Magang, (7) Program Kursus Masuk Desa, dan (8) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pembaharuan surat keputusan ijin penyelenggaraan ini dikarenakan perubahan manajemen PKBM Brigade dimana PKBM ini sudah tidak lagi berafiliasi dengan ormas Brigade maupun PDIP. PKBM Brigade menyatakan diri sebagai lembaga pendidikan yang murni bergerak dalam kegiatan pembelajaran masyarakat sehingga peserta PKBM tidak lagi hanya berasal dari calon anggota maupun kader Brigade, melainkan juga masyarakat luas. Kepengurusan PKBM Brigade saat ini adalah sebagai berikut.

- Pembina Teknis: Kepala Unit Kecamatan (Pembina UPTK)
- Ketua Penyelenggara: Drs. Mustar Manurung
- Bendahara: Drs. Toni Limbong
- Sekretaris: Dewi Shinta
- Ketua Kejar Paket C: Drs. Toni Limbong
- Ketua Kejar Paket B: Winda
- Ketua Kejar Paket A: Winda
- Ketua Pemberantasan Buta Huruf: Dewi Shinta
- Pengajar: Drs. Mustar Manurung, Drs. Toni Limbong, Dewi Shinta, Winda, dan lain-lain

PKBM Brigade adalah PKBM Pelopor untuk wilayah Kabupaten Bogor, karena pada sekitar tahun 2002 baru ada 2 PKBM untuk wilayah Kabko Bogor. PKBM Brigade sudah mendapatkan akreditasi PKBM. Apabila pada awalnya peserta PKBM Brigade adalah calon anggota dan kader ormas Brigade maka pada masa-masa berikutnya peserta PKBM ini berasal dari berbagai pelosok, bahkan ada yang berasal dari luar Kabko Bogor. Mereka yang berasal dari luar Kabko Bogor antara lain adalah kerabat dari para calon dan kader ormas Brigade tersebut. Saat ini masyarakat sekitar lokasi PKBM Brigade sudah banyak yang menjadi peserta, bahkan telah menjadi mayoritas.

Sepanjang masa penyelenggaraan, PKBM Brigade pernah menjalin kerja sama dengan beberapa instansi. Dengan Balai Latihan Kerja (BLK), PKBM menjalin kerjasama dalam rangka memberi keterampilan pembuatan nata decoco kepada peserta program. Kerjasama lainnya adalah dengan SMK Nusa Bangsa untuk peminjaman gedung sebagai tempat pembelajaran dan kantor sekretariat. Peminjaman gedung tidak dipungut biaya karena beberapa guru SMK menjadi pengajar di PKBM tersebut. Ke depan, PKBM Brigade berencana membuka jurusan (Teknik Komputer Jaringan (TKJ) setara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Prasarana berupa computer masih menunggu pengiriman dari Dinas Pendidikan.

b. Program Pembelajaran.

Program pembelajaran yang diselenggarakan PKBM Brigade antara lain adalah 1) Kejar Paket Keaksaraan Fungsional, (2) Kejar Paket A setara SD, (3) Kejar Paket B setara SMP, (4) Kejar Paket C setara SMA, dan (5) Kelompok Belajar Usaha. Namun demikian,

sampai saat ini program utama yang diselenggarakan adalah (1) Kejar Paket A setara SD, (2) Kejar Paket B setara SMP, dan (3) Kejar Paket C setara SMA.

Proses pembelajaran dalam 1 tahun kegiatan belajar-mengajar dibagi menjadi 2 tahap, yaitu periode I yang dimulai pada bulan Januari sampai Juni yang mana ujian jatuh pada bulan April yaitu waktunya bersamaan dengan waktu Ujian Nasional (UN). Sementara itu, tahap II dimulai pada bulan Juni sampai dengan Bulan Desember yang mana ujian jatuh pada bulan Agustus. Berikutnya periode I dimulai pada bulan Agustus sampai Januari dan periode II dimulai bulan Januari sampai Agustus. Dengan demikian, rekrutmen peserta berlangsung sepanjang waktu periode tersebut sampai menjelang ujian.

Terdapat dua syarat utama untuk menjadi peserta PKBM Brigade, yaitu (1) peserta telah berusia minimal sesuai ketentuan yang ditetapkan dan (2) memiliki ijazah sesuai ketentuan Program Paket yang akan diikuti. Syarat usia peserta yang akan mengikuti Program Paket adalah untuk Paket A antara lain peserta harus berusia minimal 10 tahun setara kelas IV Sekolah Dasar (SD) dan harus sudah melek aksara. Paket B memiliki ijazah SD/ sederajat dan berumur 16-50 tahun. Paket C memiliki ijazah SMP/ sederajat dan berumur 18-50 tahun. Pembatasan usia dan pemberlakuan syarat ijazah ini dikarenakan program pendidikan paket A, B, dan C diakui setara dengan pendidikan SD, SMP, dan SMA.

Lama belajar peserta dengan persyaratan tersebut di atas adalah maksimal 1 tahun untuk dapat mengikuti ujian, sehingga pada saat mereka lulus maka usia minimalnya setara dengan usia lulusan SD, SMP, atau SMA. Namun, dikarenakan masa studi SMP dan SMA formal adalah 3 tahun maka untuk peserta yang akan mengikuti ujian Paket B dan Paket C misalnya di tahun 2014 harus memiliki ijazah yang diterbitkan pada tahun 2011 atau sebelumnya. Hal ini juga berlaku untuk lulusan PKBM, yaitu mereka yang lulus Paket A atau B pada tahun 2014 dapat langsung melanjutkan Program Paketnya pada strata yang lebih tinggi dengan menempuh waktu belajar 3 tahun. Mekanisme ini disebut "Titi Mangsa".

Waktu pembelajaran dua hari dalam seminggu, yaitu pada hari Selasa dan Kamis pada pukul 15.00 – 17.00 WIB. Jadwal ini tidak pernah berubah sejak masa berdiri sampai saat ini. Namun demikian, tidak ada keharusan peserta mengikuti penuh waktu pembelajaran, artinya tidak ada batasan jumlah minimal peserta mengikuti pembelajaran walaupun tersedia absensi. Bahkan peserta dapat mengikuti ujian tanpa pernah mengikuti proses pembelajaran. Ketentuan ini diberlakukan mengingat peserta dianggap sudah memiliki pengalaman bekerja. Sepanjang masa observasi penelitian, jumlah dan peserta yang masuk bersifat fluktuatif dan bervariasi.

Kurikulum PKBM sama dengan kurikulum sekolah formal. Walaupun menggunakan buku acuan tersendiri namun kompetensi yang harus dimiliki peserta PKBM sama dengan kompetensi yang dimiliki siswa sekolah formal. Contoh judul buku acuan pembelajaran adalah: (1) Modul bahasa dan Sastra Indonesia dengan Pendekatan Tematik dan Induktif untuk paket B tingkat III derajat kompetensi terampil 1 setara kelas VIII, (2) Modul Geografi Program Belajar Paket C setara SMA kelas X. Disamping itu, *cutting score* kelulusan sama dengan *cutting score* kelulusan sekolah formal, misalnya *cutting score* lulusan Paket C adalah 5,5. PKBM Brigade hanya menyelenggarakan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan mata pelajaran yang diajarkan hanya mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Negara (UN), yaitu Geografi, Sosiologi, Ekonomi, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Pendidikan Kewarganegaraan dan Matematika. Hal ini berkaitan dengan sarana dan prasarana PKBM yang tidak cukup memadai untuk dapat menyelenggarakan jurusan IPA, misalnya ketersediaan laboratorium.

Evaluasi belajar dilakukan melalui mekanisme Ujian Semester (US) dan Ujian Nasional (UN) yang disebut Ujian Nasional Program Kesetaraan (UNPK). Bagi peserta Tahap I UN diselenggarakan bersamaan waktunya dengan UN sekolah formal. Soal UN sama/beda dengan sekolah formal. Sementara itu, untuk peserta tahap II Ujian diselenggarakan sendiri antar semua PKBM Kabupaten Bogor dengan soal yang disiapkan dari dan dinilai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Sementara itu soal US juga disiapkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, namun dinilai oleh PKBM itu sendiri. Rumus penilaian adalah $40\% \text{ US} + 60\% \text{ UN}$. Ijasah Program Paket ini dapat digunakan untuk mendaftar ke sekolah atau perguruan tinggi, serta dapat digunakan untuk penyetaraan golongan kepegawaian baik di instansi negeri dan swasta. Beberapa lulusan PKBM Brigade yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi antara lain ke Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, Akademi Kebidanan, sekolah tinggi jurnalis, akademi informatika, dan Sekolah tinggi agama islam.

Pendanaan PKBM Brigade pada masa awal berdiri berasal dari Ormas Brigade. Namun sejak tahun 2006 PKBM Brigade sudah mampu berswadaya melalui pendanaan yang berasal dari subsidi pemerintah sebesar Rp.200.000 potong pajak yang dibayarkan tiap triwulan serta pembayaran dari peserta. Peserta tidak dikenakan biaya pembelajaran, namun ditarikdikenakan untuk biaya ujian dan penerbitan ijasah sebesar Rp-1.500.000 dengan cara dicicil sejak peserta mulai mendaftar. Sementara itu, guru dibayar sebesar Rp.50.000,00 per kedatangan tanpa gaji bulanan. Rekrutmen guru ini tidak didasarkan atas kriteria tertentu.

Saat ini personil guru terdiri dari pengelola PKBM ditambah dengan beberapa guru SMK Nusa bangsa.

C. Pemaknaan Paket C oleh Peserta

Peserta Program Paket C PKBM Brigade memiliki tahun kelahiran antara tahun 1985 sampai 1999, artinya berusia antara 29 sampai dengan 15 tahun. Dengan asumsi persyaratan masuk SD harus berusia 6 tahun maka mereka yang berusia 29 tahun berarti telah lulus dari pendidikan setara SMP 15 tahun yang lalu, sedangkan mereka yang berusia 15 tahun berarti baru 1 tahun lulus SMP. Dilihat dari status pekerjaan, mereka ini ada yang tidak bekerja, bekerja, dan ibu rumah tangga. Mereka yang tidak bekerja memiliki tahun kelahiran 1995 sampai dengan 1999. Mereka yang menyatakan tidak sedang bekerja ini ada yang memang belum pernah bekerja namun ada pula yang sudah pernah bekerja tetapi saat penelitian ini dilakukan mereka tidak lagi bekerja atau menganggur. Pekerjaan dari mereka yang saat ini bekerja adalah sebagai pedagang, *cleaning servise*, pertukangan, dan penjaga toko.

Dilihat dari pekerjaan yang dimiliki peserta maka dapat dikatakan bahwa mereka berasal dari kelompok social ekonomi bawah. Hal ini dikuatkan dengan alasan mereka mengikuti Paket C yaitu dikarenakan alasan ekonomi, yaitu biaya terjangkau. Selain itu, alasan mereka mengikuti Program Paket C adalah agar dapat memperoleh pekerjaan atau memperoleh pekerjaan sesuai ijazah yang mereka miliki setelah lulus program. Namun nampaknya dikarenakan sebagian besar dari peserta Program Paket C PKBM Brigade masih muda, yaitu di bawah 20 tahun, maka dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi juga menjadi alasan mereka mengikuti program.

Peserta Program Paket C PKBM Brigade mengetahui keberadaan PKBM Brigade dari orang dekatnya yaitu teman, tetangga, saudara, dan guru. Setelah mereka mendapat informasi tentang PKBM ada dari mereka yang segera mendaftar namun ada pula yang butuh waktu bahkan sampai tiga tahun lebih untuk mendaftar sebagai siswa. Mereka yang menunda hingga beberapa tahun ini beralasan karena pada saat itu mereka belum merasa membutuhkan, di samping ada juga yang menyatakan mereka masih ragu-ragu. Kondisi ini menjadi alasan bagi peserta mengikuti Program Paket C. Berdasarkan teori weber dan colleman maka tindakan peserta ini adalah tindakan yang rasional karena ditujukan pada pencapaian tujuan-tujuan yang secara rasional diperhitungkan dan diupayakan sendiri oleh aktor yang bersangkutan. Menurut Teori *Rational Choice* (yang berorientasi pada individualisme) bahwa:

- pemahaman terhadap fenomena sosial dibangun dari pemahaman terhadap preferensi, keyakinan, dan strategi individu.
- Manusia memiliki kapasitas nalar untuk membangun dan menentukan pilihan serta kecenderungan manusia untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan resiko
- individu-individu bertindak secara rasional ketika mereka dirangsang oleh stimulus tertentu dan di mana pilihan-pilihan mereka juga terbatas

Sementara itu menurut *Teori Konflik Weber* bahwa (1) Pendidikan merupakan senjata bagi kelompok subordinat untuk tetap bisa bertahan, (2) pendidikan dilihat sebagai akses bagi posisi-posisi pekerjaan yang diinginkan, dan (3) Kelompok subordinat juga menggunakan pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan status ekonominya. Sementara itu, komitmen peserta dalam proses pembelajaran tidak optimal, yang dapat ditunjukkan dari:

- mayoritas memiliki tingkat kehadiran yang sangat rendah
- tidak memiliki sumber dan media belajar yang mendukung pencapaian kompetensi
- berorientasi pada pemerolehan dokumen legalitas

Komitmen peserta yang tidak optimal ini selaras dengan komitmen PKBM yang juga tidak optimal. Hal ini dapat dilihat dari tidak ada batasan minimal peserta mengikuti proses pembelajaran, bahkan ada yang tidak pernah mengikuti proses pembelajaran

- Peserta tidak memiliki buku belajar karena buku yang digunakan adalah buku panduan mengajar guru
- semua peserta yang mengikuti ujian dinyatakan lulus

PKBM berpendapat bahwa mayoritas peserta telah memiliki pengalaman bekerja yang memadai dan hanya membutuhkan dokumen legalitas untuk meningkatkan kualifikasinya. PKBM wajib memberikan laporan di akhir kegiatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melakukan monitoring namun tidak pernah diberikan *feedback* maupun penilaian dan tindak lanjut hasil penilaian atas kinerja PKBM.

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

- Persyaratan dan peningkatan kualifikasi karyawan menjadikan kebutuhan dan permintaan terhadap dokumen legalitas menjadi sangat penting. Implikasi lebih lanjut adalah:
 - Pemerintah: meningkatkan jumlah lulusan SMA
 - Institusi pendidikan: menyediakan layanan pendidikan setingkat SMA
 - Masyarakat: memiliki dokumen legalitas setingkat SMA
- Peserta PKBM dengan karakteristiknya (status ekonomi, pengelolaan waktu, orientasi pekerjaan, dan harapan masa depan) memaknai pendidikan sebagai sarana peningkatan status sosial ekonomi (menjadi pegawai dan memperoleh penghasilan dengan tingkat yang lebih tinggi)
- PKBM Brigade memaknai pendidikan sebagai sarana sarana peningkatan status sosial ekonomi peserta (peserta sudah memiliki pengalaman kerja yang memadai, yang belum adalah dokumen legalitas setingkat SMA)
- Dinas Pendidikan (dengan berbagai keterbatasan) memaknai pendidikan sebagai sarana peningkatan status sosial ekonomi peserta (semua peserta ujian lulus, tidak ada pembinaan yang memadai terhadap PKBM, permintaan thd peningkatan kualifikasi karyawan)
- Respon atas kebijakan peningkatan kualifikasi karyawan mengkrystal dalam bentuk praktik-praktik sosial yang sarat dengan muatan makna, sebagaimana dikemukakan oleh pendekatan interpretasi budaya bahwa praktik-praktik sosial dimanifestasikan oleh makna yang diberikan oleh para pelaku kepada praktik tersebut
- Ketercapaian filosofi pendidikan PLS, khususnya PKBM, sebagaimana yang diamanahkan oleh:
 - UUD 1945 → hanya sampai pada ketercapaian peningkatan jumlah lulusan SMA
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) → masih merupakan impian
 - Pasal 26 dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 → tidak tercapai

B. Saran

- Dalam merumuskan kebijakan program maka harus dipertimbangkan benar kondisi sasaran program, kesiapan segala aspek, implikasi logis dari program, dan ketercapaian tujuan akhir program
- Dengan jumlah penduduk dan usia muda yang besar maka pendidikan kejuruan baik tingkat SLTA dan Perguruan Tinggi harus lebih diperbanyak dibanding pendidikan umum (perbandingan saat ini 70 SMA : 30 SMK)
- Pendidikan umum dan pendidikan kejuruan harus memiliki karakteristik tertentu yang berbeda
- Pemerintah harus terus meningkatkan citra dan penghargaan bagi pendidikan kejuruan
- PKBM sebagai “penambah” pendidikan setara SD, SMP, SMA harus memiliki karakteristik khusus sehingga dapat diterima masuk ke perguruan tinggi negeri dengan persyaratan dan perlakuan khusus.
- Berkoordinasi dengan wadah PKBM, pemerintah harus melakukan kontrol, pembinaan, dan pembantuan secara benar

DAFTAR PUSTAKA

- Bartlett, Lesley. (2007). Human Capital or Human Connection? The Cultural Meanings of Education in Brazil. <http://www.academia.edu/938284/>. Diakses 15 Januari 2014.
- Fitria, Vita. (2012). Interpretasi Budaya Clifford Geertz: Agama sebagai Sistem Budaya. *Sosiologi Reflektif*, volume 7, nomor 1, Oktober 2012. <http://www.google.com>. Diakses 15 Januari 2014
- Fryberg, Stephanie A. (2007). Cultural Models of Education in American Indian, Asian American and European American Contexts. *Social Psychology of Education Journal*, volume 10, pp. 213-246, June 2007 dalam Springer.
- Gilead, Tal. (2009). Human Capital, Education and The Promotion of Social Cooperation: A. Philosophical Critique. *Studies in Philosophy and Education Journal*, volume 28, pp 555-567, November 2009 dalam Springer.
- Moedjiarto. (-). Pelaksanaan Program Kejar Paket B Di Kabupaten Trenggalek Jawa Timur. ejournal.unesa.ac.id/article/7348/74/article.pdf. Diakses 12 Januari 2014.
- Nibel, Hendrowanto. (2007). Keikutsertaan warga Belajar Pada Program Kejar Paket C (Studi Kasus di PKBM Tilung Raya di Kota Palangkaraya. <http://re-searchengines.com/1007hendrowanto.html>. Diakses 12 Januari 2014.
- Payne, Sheila. (2007). *Grounded Theory* (Lyons & Coyle. *Analysing Qualitative Data in Psychology*). London: SAGE Publications.
- Piliang, Zulkifli Agus. (2006). Kejar Paket C, Pendidikan Alternatif dalam Suara Merdeka Perekat Komunikasi Jawa Tengah.
- Saifuddin, Achmad Fedyani. (2006). *Antropologi Kontemporer. Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sanderson, Stephen K. (1991). *Macrosociology. An Introduction to Human Societies*. New York: Harper Collins Publisher.
- Sujarwo. Strategi Pembelajaran Orang Dewasa: Pendekatan Andragogi. [http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Dr. _Sujarwo, _M.Pd./Makalah-Strategi Pembelajaran Orang dewasa Repaired.pdf](http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Dr._Sujarwo,_M.Pd./Makalah-Strategi_Pembelajaran_Orang_dewasa_Repaired.pdf). Diakses 12 Januari 2014.
- Sunarto, Kamanto. (2000). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Press.
- Suparman, Atwi. (1996). *Desain Instruksional*. Jakarta:PAU-PPAI Universitas Terbuka.
- Syamnsi, Ibnu. (2010). Pendidikan Luar Sekolah Sebagai Pemberdaya dalam Masyarakat, dalam *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, volume 14, Nomor 1, maret 2010, ISSN: 0854-896x

<http://tliindonesia.wordpress.com/2009/02/03/dasar-dasar-pembelajaran-partisipatif-participatory-learning/>. Diakses 12 Januari 2014.

<http://bine5.wordpress.com/pod/teori-belajar-orang-dewasa/>. Diakses 12 Januari 2014.

<http://tliindonesia.wordpress.com/2009/02/03/dasar-dasar-pembelajaran-partisipatif-participatory-learning/>. Diakses 12 Januari 2014.